

TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan tujuan penelitian, pada bab ini dikaji hasil-hasil penelitian dan kajian teoritis yang melandasi pentingnya mengkaji keragaan pemenuhan pangan dan perumahan sebagai bagian dari indikator kesejahteraan keluarga nelayan di daerah rawan bencana. Bagian pertama dibahas mengenai karakteristik keluarga nelayan serta bencana alam dan dampaknya bagi kualitas kehidupan keluarga, yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Bagian kedua dibahas bahwa keluarga merupakan sistem yang berusaha mencapai kesejahteraan keluarga baik secara obyektif maupun subyektif serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagian yang terakhir mengkaji mengenai keragaan pemenuhan pangan dan kualitas perumahan sebagai bagian dari indikator kesejahteraan keluarga.

Karakteristik Keluarga Nelayan

Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan (2000) definisi nelayan adalah orang yang aktif dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang hidup di pedesaan pesisir dan memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kondisi masyarakat di luar komunitasnya, baik dari sudut pandang geokologi, ekonomi, maupun sosial. Secara ekologi dan geografis masyarakat pesisir diuntungkan dengan luasnya lahan garapan mereka. Namun secara ekonomi, masyarakat di daerah pesisir berhadapan dengan ketidakpastian. Modal dan pendapatan nelayan umumnya rendah, sedangkan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Selain itu, masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang dihadapkan langsung dengan keadaan ekosistem yang keras, dan sumberdaya kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut (Satria 2002).

Nelayan sebagai suatu komunitas masyarakat, memiliki sistem sosial yang berbeda. Secara tidak langsung, nelayan distratifikasi berdasarkan kepemilikan aset atau alat penangkapan dan keterlibatan orang lain dalam usaha penangkapan ikan (Mulyadi 2005). Stratifikasi ini menyebabkan masyarakat nelayan terbagi menjadi dua kelompok yaitu nelayan juragan dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau yang disebut dengan juragan adalah orang yang memiliki sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

penangkapan seperti kapal/perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya. Nelayan buruh adalah orang yang bekerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut (Satria 2002).

Kehidupan nelayan berada pada lingkungan keterbatasan dan kemiskinan yang dibatasi oleh mobilitas usaha dan ketidakpastian usaha karena ketergantungan terhadap musim. Kondisi ini menyebabkan pendapatan nelayan sangat fluktuatif. Selain itu, pendapatan nelayan juga sangat ditentukan oleh pemilikan kekayaan khususnya penguasaan alat tangkap berupa perahu atau kapal beserta perangnya (Carner 1984 diacu dalam Wasposito 2003). Ciri lain yang melekat pada rumah tangga nelayan meliputi: 1) rumah dan barang yang dimiliki terbatas dan sangat sederhana, 2) tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, 3) produktivitas kerja rendah, 4) keterampilan kurang memadai, dan 5) kurang dapat mengikuti pembaharuan dan kurang memperoleh kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Nelayan, sebagai suatu komunitas masyarakat memiliki sistem sosial yang berbeda. Secara tidak langsung, nelayan distratifikasi berdasarkan kepemilikan aset atau alat penangkapan dan keterlibatan orang lain dalam usaha penangkapan ikan (Mulyadi 2005). Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kesulitan mengakses berbagai layanan publik. Terdapat persoalan tertentu yang terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga masyarakat di kawasan pesisir masih tertinggal (Hanson 1984 dalam Amanah *et al*, 2005).

Nelayan dapat dikategorikan menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau yang disebut dengan juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan seperti kapal/perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya. Nelayan buruh adalah orang yang bekerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut (Satria 2002). Mubyarto, Sutrisno, dan Dove (1984) menambahkan bahwa sekelompok nelayan yang tidak memiliki alat tangkap dan perahu harus menjadi buruh bagi nelayan lainnya, di mana pendapatan dipengaruhi oleh pola bagi hasil di kalangan nelayan.

Besar Keluarga. Besar keluarga menunjukkan jumlah individu yang tinggal dalam suatu keluarga. Prabawa (1998) mengungkapkan bahwa setinggi

apapun tingkat pendapatan yang diperoleh seorang kepala keluarga dalam rumah tangganya, pada akhirnya kesejahteraan akan banyak ditentukan oleh pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan perkapita selain ditentukan oleh total pendapatan yang diterima, juga oleh seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga yang bersangkutan. Tidak semua anggota keluarga dalam rumah tangga bekerja produktif sehingga menjadi beban tanggungan. Banyaknya jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita dan besarnya konsumsi keluarga. Oleh karena itu, jumlah anggota keluarga atau besar keluarga akan memberi dorongan bagi rumah tangga bersangkutan untuk lebih banyak menggali sumber pendapatan lainnya.

Pendidikan. Hasil penelitian Megawangi (1994) membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan suami berhubungan nyata positif dengan kebiasaan merencanakan anggaran biaya. Dengan demikian, kemampuan melihat ke depan dengan mengadakan perencanaan biaya dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi penduduk, dan semakin banyak anggota rumah tangga cenderung semakin sulit merencanakan biaya. Rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dengan pendidikan rendah cenderung lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh mereka yang berpendidikan tinggi.

Pendapatan. Secara umum pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari. Menurut Dahuri dkk (1996) diacu oleh Waspodo (2003), di daerah yang padat penduduknya seperti daerah pantai utara Jawa, sudah terjadi kelebihan tangkap (*over fishing*). Pendapatan nelayan ditentukan juga oleh produktivitas alat tangkap, keterampilan yang dimiliki, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam penangkapan dan sistem bagi hasil yang dicapai (Syafin 1993 diacu oleh Waspodo 2005). Mengacu pada pendapat Carner (1984), Waspodo (2003) menambahkan bahwa besar pendapatan kelompok masyarakat nelayan berbeda-beda tergantung pada pemilikan kekayaan khususnya penguasaan alat tangkap berupa perahu atau kapal beserta perangnya.

Faktor pendapatan memiliki peranan besar dalam persoalan gizi dan kebiasaan makan masyarakat setempat (Berg 1986 diacu oleh Puspa 2007). Ketersediaan pangan suatu keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan

keluarga tersebut. Rendahnya pendapatan merupakan satu hambatan yang menyebabkan daya beli menurun sehingga tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang besar dan atau mutu yang diperlukan.

Kepemilikan Aset. Sumberdaya bermakna sebagai sumber dari kekuatan, potensi dan kemampuan untuk mencapai suatu manfaat dan tujuan. Sumberdaya merupakan aset, yaitu sesuatu apapun baik yang dimiliki atau yang dapat diakses, yang dapat memberikan nilai tukar untuk mencapai tujuan. Aset tersebut bisa berupa sumberdaya ekonomi, potensi manusia, karakter pribadi, kualitas lingkungan, sumberdaya alam, fasilitas masyarakat (Rice & Tucker 1986 diacu dalam Sunarti 2008). Sumberdaya keluarga ditinjau dari sudut pandang ekonomi merupakan alat atau bahan yang tersedia dan diketahui fungsinya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan keluarga (Gross, Crandall & Knoll 1980 diacu dalam Nuryani 2007). Sumberdaya berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya materi/non manusia. Sumberdaya manusia mempunyai dua ciri, yaitu pribadi/personal dan interpersonal, sedangkan sumberdaya materi terdiri dari benda-benda atau barang, jasa, waktu, dan energi. Sumberdaya materi dalam keluarga adalah aset/kekayaan keluarga. Menurut Guhardja *et al.* (1992) aset keluarga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut: 1) aset lancar, yaitu barang-barang kekayaan yang relatif cepat dapat diuangkan misalnya emas, perhiasan, dan uang tunai, dan 2) aset tidak lancar, yaitu barang-barang kekayaan yang relatif agak lama jika diuangkan misalnya tanah, rumah, mobil, kebun, surat-surat berharga, saham, dan investasi modal.

Bencana Alam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Keluarga

Bencana alam merupakan peristiwa dramatis yang disebabkan oleh kejadian alam dan ulah manusia. Secara umum, bencana alam dicirikan dengan waktu bencana yang relatif singkat, terjadi secara tiba-tiba, tidak terkontrol tetapi dapat diprediksi, serta dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan (Bell *et al.* 1990). Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Carter (1991) menambahkan terdapat beberapa macam bencana alam, antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Terjadinya bencana alam akan memberikan resiko yang besar pada masyarakat. Hasil kajian terhadap kegiatan pengurangan resiko bencana pada tahun 2007 oleh sekretariat ISDR (*International Strategy for Disaster Reductin*) mengidentifikasi dua potensi resiko bencana, yaitu yang bersifat intensif dan ekstensif. Resiko yang bersifat intensif menyangkut kecenderungan konsentrasi manusia dan kegiatan ekonomi yang mungkin mengalami kerusakan hebat akibat kejadian bencana dalam skala besar. Resiko ekstensif meliputi kecenderungan populasi manusia yang lebih tersebar, tetapi rentan terhadap bencana yang bersifat lokal, berintensitas rendah, dan dampaknya bersifat kumulatif atau kronis, misalnya akibat perubahan iklim.

Lembaga Demografi Universitas Indonesia (2008) memaparkan bahwa ukuran resiko bencana pada suatu masyarakat dapat dianalisis menggunakan HDI (*Human Development Index*) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dapat digunakan untuk ukuran resiko bencana suatu masyarakat. HDI diukur dari tiga indikator yang menunjukkan tingkat penghidupan manusia, angka harapan hidup, dan pendapatan. Ketiganya menunjukkan seberapa *resilience* atau ketahanan satu masyarakat yang apabila dikombinasikan tingkat kesiapan dan kewaspadaan akan memperlihatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi dampak bencana. Negara-negara dengan HDI tinggi akan lebih tahan atau *resilience* terhadap bencana dan sebaliknya. Bukti statistik bencana dunia juga menunjukkan hubungan positif tersebut, dimana korban akibat bencana di negara-negara dengan HDI rendah jauh lebih besar.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bencana sangat merusak dan menimbulkan stress yang menyebabkan masalah emosional (Kardinet *et. al.* 1945 diacu dalam Bell *et. al.* 1990), keterbatasan kebebasan, rusaknya komunitas, serta rusaknya berbagai sarana yang telah dibangun. Disisi lain, pada faktanya

beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak bencana dapat bersifat positif berupa peningkatan kelekatan sosial. Karena merasa memiliki nasib yang sama, korban bencana akan cenderung saling menolong satu sama lain (Bell *et. al.* 1990).

Kesejahteraan Keluarga

Keluarga merupakan bagian dari sistem dan berinteraksi dengan beragam lingkungan (Sunarti 2007), artinya keluarga akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akan berpengaruh pada kualitas kehidupan keluarga, atau dikenal dengan istilah kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, (Soetjipto 1992; Iskandar 2007), sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud (Soetjipto 1992). Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi pendapatan yang diterima (Rambe 2004), namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif (Rambe 2004; Sumarti 1999) yang dibentuk masyarakat melalui interaksi sosial (sumarti 1999).

Lee dan Hanna (1990) dalam Iskandar (2007) mendefinisikan kesejahteraan sebagai total dari *net worth* (kekayaan bersih) dan *human capital wealth* (kesejahteraan sumberdaya manusia). Manfaat yang diperoleh merupakan nilai atas aset yang dimiliki dikurangi hutang (*liabilitas*). Sedangkan kesejahteraan SDM dapat diduga melalui pendapatan yang dihasilkan oleh SDM (*human capital income*) yang ada saat ini, atau dihitung dari nilai pendapatan non aset.

Menetapkan indikator kesejahteraan keluarga serta cara pengukurannya merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan secara tuntas. Hal ini disebabkan karena permasalahan keluarga sejahtera bukan hanya menyangkut satu bidang saja, tetapi menyangkaut berbagai bidang kehidupan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan pendekatan integrasi berbagai bidang disiplin

ilmu dan atau melalui pengalaman empirik berbagai kasus untuk dapat menemukan indikator keluarga sejahtera yang berlaku umum dan spesifik (Prabawa 1998). Pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga yaitu berdasarkan pendekatan objektif dan subyektif.

Kesejahteraan Obyektif

Pendekatan obyektif diturunkan dari data kuantitatif diperoleh dari angka-angka yang langsung dihitung dari aspek yang ditelaah. Pendekatan obyektif atau yang dikenal dengan istilah kesejahteraan obyektif melihat bahwa tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat hanya diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial, maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan baku (tingkat kesejahteraan semua masyarakat dianggap sama). Ukuran yang sering digunakan yaitu terminologi uang, pemilikan akan tanah, pengetahuan, energi, keamanan, dan lain-lain. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan konvensional untuk kepentingan politik karena pengukurannya sangat praktis dan mudah dilakukan, namun sedikit sekali menyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya (Santamarina *et. al* diacu dalam suandi 2005).

Untuk menentukan suatu keluarga sudah digolongkan sejahtera atau belum tentunya diperlukan ukuran pendapatan yang biasa disebut juga garis kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan secara material. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat terlihat dari tingkat kesehatan masyarakat. Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan dipandang sebagai salah satu indikasi ketidaksejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Tingkat pendidikan masyarakat juga sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Ukuran yang sangat mendasar adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Selain itu rata-rata lama sekolah penduduk juga menjadi indikator kesejahteraan rakyat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15-64 tahun) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan

kerja, yakni mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kepuasan individu dan memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. taraf dan pola konsumsi masyarakat juga dijadikan indikasi untuk melihat tingkat kemiskinan keluarga.

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengetahui taraf dan pola konsumsi adalah: 1) tingkat pendapatan; 2) pengeluaran pangan dan non pangan. Penduduk miskin ditafsirkan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak. Kebutuhan tersebut diterjemahkan sebagai jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan (Badan Pusat Statistik 2006).

Badan Pusat Statistik (2001) diacu dalam Rambe (2004) mengemukakan bahwa dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat jika dilihat dari aspek tertentu. Aspek spesifik yang dapat dijadikan indikator untuk mengamati kesejahteraan rakyat yaitu: kependudukan, kesehatan, Pendidikan, meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah, dan fasilitas pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kondisi sosial budaya.

Pengukuran kesejahteraan Berdasarkan Kriteria BPS

Sejarah, pendekatan, dan teknis pengukuran kemiskinan disadur dari BPS (2004). Badan Pusat Statistik Pertama kali melakukan perhitungan jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin. Pendekatan yang sama dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini dalam metode perhitungan penduduk miskin yaitu menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang bersifat mendasar.

Pengukuran Kesejahteraan Berdasarkan Kriteria BKKBN

BKKBN merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan secara bertahap menjadi keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III, dan keluarga sejahtera tahap III plus. Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan, dan kepedulian sosial (Sunarti 2008).

Menurut Sunarti (2008), pada tahun 2005 dilakukan kajian indikator KS secara terbatas di kalangan BKKBN untuk mengakomodir berbagai saran perbaikan. Hasil kajian tersebut menetapkan terdapat perubahan indikator KS dari 23 item menjadi 21 item.

1. Keluarga KS I: umumnya anggota keluarga makan 2 kali atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin ber KB, pergi ke pelayanan kontrasepsi, dan semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
2. Keluarga KS II: pada umumnya keluarga anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian dalam setahun, luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni 1 rumah, tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, ada soerang atau lebih keluarga yang memperoleh penghasilan Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin, dan pasangan usia subur dengan 2 anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasespsi.
3. Keluarga KS III: keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, sebagian keluarga menabung dalam bentuk uang atau barang, kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan keluarga dapat informasi dari radio/TV/majalah/surat kabar.

4. KS III Plus: keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial dan ada anggota keluarga yang aktif ikut perkumpulan sosial/yayasan/institusi/masyarakat.

Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan menjelaskan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan pemenuhan kebutuhan pangan adalah ketahanan pangan. Menurut Chung, Haddad, Ramakrisna, dan Riely (1997) sistem ketahanan pangan merupakan rangkaian tiga komponen utama, yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan, kemudahan memperoleh pangan (akses pangan), dan penyerapan pangan. Kemudian, rumah tangga yang mengalami gangguan ketahanan pangan (paceklik) akan mengatasi masalah pangannya dengan melakukan *coping strategy* (Adi *et. al.* 1999). Untuk mengantisipasi masalah pangan keluarga harus siapsiaga atau waspada. Ketiga komponen ketahanan pangan akan menentukan konsumsi pangan keluarga yang ditentukan oleh ketersediaan pangan (Harper, Deaton, & Driskel, 1986; Chung, Haddad, Ramakrisna, & Riely 1997).

Akses Pangan Rumah tangga

Akses pangan tingkat rumah tangga adalah kemampuan satu rumah tangga untuk memperoleh pangan secara terus-menerus melalui berbagai cara, seperti produksi pangan rumah tangga, jual beli, tukar-menukar/barter, pinjam-meminjam, dan pemberian atau bantuan pangan. Akses pangan menunjukkan jaminan bahwa setiap individu mempunyai sumberdaya yang cukup untuk mengakses kebutuhan pangan sesuai norma gizi (World Food Programme 2005).

Menurut Deptan (2007) akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup melalui kombinasi cadangan pangan mereka sendiri dan hasil dari rumah/pekarangan sendiri,

pembelian, pinjaman atau bantuan pangan. Kemampuan akses pangan rumah tangga dikatakan baik apabila rumah tangga mampu menjangkau pangan yang tersedia baik secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Akses pangan rumah tangga antara lain ditentukan oleh kemampuan produksi sendiri, daya beli dari pendapatan, dan daya jangkau terhadap program bantuan pemerintah maupun terhadap sumber pangan lainnya seperti lumbung pangan atau kerabat. Dengan demikian faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai indikator akses pangan rumah tangga.

Ketersediaan Pangan Rumah tangga

Ketersediaan pangan merupakan kondisi penyediaan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan, serta turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketersediaan pangan merupakan satu sistem yang berjenjang, mulai dari nasional, provinsi (regional), lokal (kabupaten/kota), dan rumah tangga (Baliwati & Rosita, 2004). Hasil dari penelitian Tim Studi Evaluasi Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI) PSKPB-IPB tahun 1991 menyatakan bahwa pada tingkat rumah tangga, ketersediaan pangan diartikan sebagai kemampuan daya beli rumah tangga untuk menjangkau harga pangan pokok yang tersedia di pasar dan atau rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok dari hasil usaha taninya. Berbagai cara dilakukan keluarga dalam usaha menyediakan pangan yang cukup bagi anggota keluarganya. Cara yang dapat dilakukan antara lain memproduksi pangan sendiri di lahan pertaniannya atau pekarangan rumah dan membeli di pasar atau warung yang ada di lingkungan tempat tinggal (Khomsan, 1996).

Kemudian dijelaskan bahwa ketersediaan pangan dapat membentuk kebiasaan makan kelompok masyarakat, faktor yang berperan dalam pembentukan kebiasaan makan tersebut adalah faktor obyektif dan subyektif dari ketersediaan pangan. Faktor obyektif misalnya pengaruh fisik alam, biologi, dan kemajuan teknologi. Sedangkan faktor subyektif adalah budaya, sosial, dan psikologi. Selain itu, dikatakan bahwa kurangnya pangan yang cukup atau tersedia untuk di makan merupakan sebab utama rendahnya keadaan kehidupan keluarga (Jutomo 2000).

Suhardjo, Hardinsyah, dan Riyadi (1988) menyebutkan ada empat faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan sehari-hari, yaitu produksi pangan untuk keperluan rumah tangga, pengeluaran pangan rumah tangga, pengetahuan gizi, dan ketersediaan pangan. Sedangkan produksi pangan untuk keperluan rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu pemilihan tanaman, neraca uang dan tanaman, sumberdaya produksi, terdapatnya tanah untuk tanaman pangan, pembagian kerja dalam keluarga.

Pengeluaran pangan dapat dipengaruhi subsidi pangan untuk pemerintah, pangan yang dibagi-bagikan di antara anggota masyarakat, jumlah dan ragam pangan yang dibeli, harga pangan di pasaran. Sebaliknya ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi pangan untuk rumah tangga dan pengeluaran pangan rumah tangga. Menurut World Food Program (2005) ketersediaan pangan rumah tangga ditentukan oleh konsumsi normatif serealialia yaitu 300 gram per orang per hari.

Pola Konsumsi

Konsumsi pangan adalah informasi pangan yang dimakan (dikonsumsi) seseorang atau kelompok orang, baik berupa jenis maupun jumlahnya pada waktu tertentu, artinya konsumsi pangan dapat dilihat dari aspek jumlah maupun jenis pangan yang dikonsumsi (Hardinsyah dan Suharjo 1990). Dengan demikian konsumsi pangan dapat dilihat dari frekuensi dan keragaman pangan. Menurut Riyadi (1996) ada tujuan seseorang mengonsumsi pangan, yaitu tujuan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah untuk memenuhi rasa lapar atau keinginan memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis merupakan suatu yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memenuhi kepuasan emosional maupun selera seseorang. Tujuan sosiologis adalah berhubungan dengan memelihara hubungan antar manusia dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.

Household Dietary Diversity (keragaman konsumsi pangan rumah tangga) merupakan jumlah jenis makanan yang berbeda, yang dikonsumsi selama periode tertentu yang ditetapkan. Keragaman konsumsi pangan adalah indikator yang baik untuk alasan berikut (Swindale dan Bilinsky 2006): a) konsumsi pangan yang lebih beragam berhubungan dengan peningkatan berat badan bayi lahir, status

antropometrik anak, dan peningkatan konsentrasi hemoglobin, dan b) konsumsi pangan yang lebih beragam berkaitan erat dengan faktor seperti; kecukupan energi dan protein, persentase protein hewani, dan pendapatan rumah tangga. Bahkan pada rumah tangga yang sangat miskin, peningkatan pengeluaran untuk makanan yang dihasilkan dari penghasilan tambahan berhubungan dengan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan.

Menurut FAO (2007) keragaman konsumsi pangan adalah kelompok pangan yang berbeda yang dikonsumsi selama periode tertentu yang ditetapkan yaitu dapat bertindak sebagai indikator alternatif bagi keamanan makanan bagi berbagai keadaan, termasuk negara dengan pendapatan sedang atau menengah, daerah pedesaan dan perkotaan, serta pada berbagai musim. Keragaman konsumsi pangan sangat penting, hal ini karena tidak ada satu jenis pangan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang lengkap. Dengan mengkonsumsi pangan yang beragam, maka kekurangan zat gizi dalam satu jenis akan dilengkapi oleh kandungan zat gizi dari pangan lainnya. Adanya prinsip saling melengkapi akan berbagai pangan tersebut akan menjamin terpenuhinya mutu gizi seimbang dalam jumlah cukup (Riyadi 1996).

Berdasarkan satuan atau unit penilaian, konsumsi pangan dibedakan atas penilaian konsumsi pangan individu dan penilaian konsumsi pangan keluarga. Umumnya prinsip penilaian zat gizi individu dan keluarga adalah sama. Konsumsi pangan keluarga merupakan penjumlahan dari konsumsi pangan masing-masing individu anggota keluarga. Apabila satuan atau unit pengumpulan data konsumsi pangan adalah kelompok orang seperti keluarga atau rumah tangga, maka jumlah konsumsi pangan keluarga atau rumah tangga dibagi dengan jumlah orang atau anggota keluarga yang mengkonsumsi pangan tersebut (Hardinshyah dan Briawan 1994).

Coping Strategy dan Kesiapsiagaan Keluarga

Secara umum, *coping* adalah sebuah strategi yang dapat membantu seseorang untuk mengurangi stress dan membantu menyelesaikan masalah. Perbedaan budaya mempengaruhi perbedaan *coping strategy* seseorang. Perlu dimengerti bahwa *coping strategy* tidak dapat dinyatakan efektif atau tidak efektif tanpa mempertimbangkan keadaan individu.

Mengutip pernyataan Davies (1993), Usfar (2002) menyatakan bahwa *coping strategy* atau *coping mechanism* merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam mengatasi situasi atau keadaan yang tidak menguntungkan. Seseorang dapat berupaya dengan mengandalkan kemampuan intelektual, fisik, maupun material. *Coping mechanism* biasanya digunakan untuk mendayagunakan alat tukar sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mendapatkan pangan untuk menjamin kelangsungan hidup diri orang tersebut dan anggota keluarganya. *Coping mechanism* juga menyediakan cara untuk memanfaatkan aset tagihan dan simpanan akses pangan yang dimiliki.

Tujuan *coping mechanism* adalah mempertahankan dari berbagai tujuan rumah tangga termasuk pemenuhan konsumsi pangan, kesehatan, status, dan mata pencaharian. Konsumsi pangan dan kesehatan merupakan tujuan yang lebih disegerakan daripada status dan mata pencaharian, karena kecukupan pangan sangat perlu untuk hidup sehat dan memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh anggota keluarga (Aams *et. al.* 1998 dalam Usfar 2002).

Adi, Kusharto, Hardinsyah, dan Susanto (1999) menyebutkan bahwa rumah tangga yang mengalami gangguan ketahanan pangan (*paceklik*) mengatasi masalah pangannya dengan melakukan *coping strategy* untuk memperoleh alat tukar dan meminimalkan resiko. Alat tukar bersifat fisik (tenaga) dengan bekerja keluar desa sebagai buruh bangunan, buruh serabutan, tukang becak, dan pedagang asongan. Alat tukar berupa benda hidup yaitu dengan menjual ternak (ayam, kambing), sedangkan alat tukar berupa benda mati (materi) yaitu dengan menjual atau menggadaikan perhiasan (emas) dan perkakas rumah tangganya.

Selain sebagai indikator ketahanan pangan, *coping strategy* juga dapat menjadi salah satu determinan ketahanan pangan. Mamun menurut Frankenberner & Goldstein (1990) dalam Maxwel & Frankenberner (1992) menyatakan bahwa belum ada bukti yang kuat bahwa keberadaan *coping strategy* yang berhasil akan menyeimbangkan antara kebutuhan pangan saat ini dengan keberlanjutan pangan di masa yang akan datang sebagai salah satu syarat ketahanan pangan.

Donahue (1998) dalam De Wagt dan Connolly (2005), menyatakan bahwa berdasarkan keseriusan situasi dan kapasitas *coping* dan perbedaan cara melakukan *coping strategy* untuk mengurangi ketidaktahanan pangan dapat

dikelompokkan menjadi: (1) *reversible* (ringan), (2) *productive assets* (menengah), dan (3) sangat parah (berat). Indikator-indikator di dalam ketiga kategori tersebut dikembangkan dalam penelitian terhadap keluarga penderita HIV/AIDS di Afrika. Perilaku *coping* berdasarkan keseriusan situasi dan kapasitas *coping strategy* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perilaku coping berdasarkan keseriusan situasi dan kapasitas *coping strategy*

<i>Reversible</i>	Menggunakan <i>Productive Assets</i>	Sangat Parah
Mencari bantuan dari anggota keluarga, teman, dan tetangga	Menggunakan tabungan	Tergantung kepada sumbangan dari lembaga pemerintah atau donator
Mengurangi konsumsi	Menjual asset termasuk tanah, binatang, dan perabotan	Migrasi
Mengubah pembelian makanan menjadi lebih murah (kadang-kadang kurang gizi)	Mengurangi pengeluaran untuk pangan dan kesehatan	Kriminalitas dan prostitusi
Mengganti cadangan uang menjadi cadangan pangan		
Mengurangi pengeluaran untuk pendidikan		
Meningkatkan pendapatan		

Sumber: Donahue (1998) dalam De Wagt dan Connolly (2005)

Perilaku *coping* yang dilakukan oleh keluarga dapat berbeda-beda. Menurut Corbett (1988) dalam Anonimous (2004), bentuk-bentuk *coping strategy* yang berbeda didasarkan pada kondisi yang bermacam-macam, sering dikategorikan ke dalam empat tingkatan merdasarkan kondisi yang berbeda. *Coping strategy* yang dilakukan diantaranya adalah dengan: 1) adaptasi terhadap perubahan pola makan, seperti konsumsi pangan bergeser kepada konsumsi jagung sebagai pengganti beras, pengurangan porsi makan perhari, konsumsi makanan yang jarang dikonsumsi, mencari tambahan pendapatan sebagai buruh, dan meminjam uang dari keluarga lainnya; 2) menjual asset-aset tidak produktif, perhiasan, meminjam kepada selain keluarga, pindah pekerjaan sementara waktu, atau mengurangi makan sepanjang hari; 3) menjual tanah, hewan ternak dan aset-aset produktif lainnya; dan 4) migrasi secara permanen dan mencari bantuan pangan. Maxwell (1996) menyatakan bahwa terdapat enam tahap utama (*food-based coping strategy*) yang disebutkan oleh responden pada penelitiannya.

Tahap-tahap tersebut adalah (1) memakan makanan yang kurang disukai; (2) membatasi porsi makan; (3) meminjam makanan atau uang untuk membeli makan; (4) perubahan distribusi makan; (5) mengurangi frekuensi makan per hari; dan (6) tidak makan selama beberapa hari.

Pemenuhan Kebutuhan Perumahan

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Menurut Milligan *et. al.* (2006) akses terhadap tempat tinggal merupakan kebutuhan manusia yang cukup mendasar. Rumah tidak hanya menyediakan tempat untuk tidur, akan tetapi menyediakan kebutuhan psikologis. Sebagai lingkungan yang paling dekat dengan manusia, kondisi rumah dapat berdampak pada standar dan kualitas hidup manusia.

Stigma sosial mengatakan bahwa perumahan dapat berdampak pada kesehatan mental keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap orangtua di Amerika, menunjukkan bahwa orang tua yang lemah akan lebih rentan jika tinggal di perumahan miskin (Lawton 1989; Moos & Lemke 1994 dalam Evans, Kantrowitz, & Eshelman 2002). Perumahan yang baik dapat menjadi tempat dimana kita merasa aman, merasa memiliki, mengekspresikan diri kita (Brown & Perkins 1992 dalam Evans, Kantrowitz, & Eshelman 2002).

Badan Pusat Statistik (2004) menjelaskan komponen perumahan menjadi penguasaan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan, fasilitas dan perlengkapan rumah, serta kondisi lingkungan. Senada dengan Badan Pusat Statistik (2004), Statistic New Zealand (2001e) dalam Milligan (2006) mengklasifikasikan komponen pemenuhan perumahan menjadi status kepemilikan rumah, kondisi fisik bangunan (*habitability*), dan bebas dari kesesakan (*crowding*).

Status Kepemilikan Rumah

Status Kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan keluarga (Statistic New Zealand 1998d diacu oleh Milligan *et. al.* 2006). Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan kepemilikan rumah berhubungan signifikan dengan kesejahteraan materi. Kepemilikan rumah merupakan indikator kekayaan dan status sosial, yang sangat berhubungan dengan pendapatan status sosial ekonomi seseorang. Selain itu, kepemilikan rumah

menunjukkan keamanan dan stabilitas finansial seseorang, sekaligus mengurangi resiko frekuensi berpindah rumah. Kepemilikan rumah dalam pandangan nilai budaya, rumah merupakan investasi untuk masa depan. Selain berhubungan dengan kesejahteraan materi, rumah juga berhubungan dengan kesejahteraan subyektif. Hasil Penelitian Diener (2002) menunjukkan bahwa rumah memberikan pengaruh terbesar terhadap kesejahteraan subyektif seseorang.

Kesesakan (*Crowding*) dan Kepadatan (*Density*)

Kesesakan menunjuk pada kondisi rumah yang tidak nyaman. Kesesakan muncul ketika rumah tidak dapat menyediakan tempat tinggal yang cukup bagi anggotanya (Statistic New Zealand 2004b). Kesesakan merupakan bentuk dari kemiskinan yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Berbagai penelitian menunjukkan kesesakan berhubungan positif dengan peningkatan penyakit fisik dan mental (Baker *et. al.* 2004 diacu dalam Milligan *et. al.* 2006).

Menurut Asiama (1990) dalam Fiadzo dikemukakan bahwa kesesakan terjadi jika dua orang menempati satu ruangan dalam rumah. Sedangkan kesesakan berlebih (*overcrowding*) terjadi jika lebih dari 2 orang menempati satu ruangan dalam rumah.

Sebagai indikator kesejahteraan keluarga, *crowding* diukur dengan *crowding index*, yang dianalisis berdasarkan jumlah kamar tidur yang ada di rumah dan jumlah anggota keluarga. Statistic New Zealand (2004c) diacu dalam Milligan *et. al.* (2006) menetapkan formulasi pengukuran kesesakan dengan membandingkan antara [(1/2 jumlah anak <10 tahun) +(jumlah pasangan) + jumlah anggota keluarga lain \geq 10 tahun)] dengan jumlah kamar tidur. Indeks kesesakan yang >1 menunjukkan rumah yang termasuk kategori sesak.

Komponen perumahan lain yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan keluarga adalah kepadatan (*density*). Kepadatan menunjuk pada luas lantai yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam rumah. Sebagai indikator kesejahteraan keluarga, BKKBN menetapkan luas lantai minimal yang memenuhi syarat rumah sehat adalah $\geq 8 \text{ m}^2$ per orang (Sunarti 2007).

Kepadatan, sama halnya dengan kesesakan menunjukkan terbatasnya ruang pribadi bagi seseorang. White (1975) dalam Bell *et. al.* (1990) mengungkapkan bahwa ruang pribadi (*personal space*) meningkat dengan

pengurangan ukuran ruangan dan menurun dengan penurunan ukuran ruangan. Selanjutnya Davis & Swaffer (1971) dalam Bell *et. al.* (1990) menemukan bahwa individu lebih berkeinginan memiliki tempat yang lebih luas diruang yang sempit daripada ruang yang lebih luas. Dan juga Baum, Reiss & O hara (1971) dalam Bell *et. al.* (1990) menjelaskan bahwa penempatan partisi di ruangan dapat mengurangi perasaan terganggu oleh anggota keluarga lain.

Kondisi Fisik, Fasilitas dan perlengkapan, serta Kondisi Lingkungan Rumah

Status ekonomi rumah tangga diperkirakan dapat mempengaruhi kondisi rumah tempat tinggal. Kondisi fisik rumah dapat dilihat dari jenis lantai, dinding, dan atap bangunan rumah. Fasilitas dan perlengkapan rumah digambarkan dengan jumlah dan jenis ruangan, fasilitas tempat mandi, kualitas air minum, bahan bakar untuk masak, sumber penerangan, dan penguasaan barang. Sementara kondisi lingkungan rumah digambarkan dengan lokasi rumah, kondisi lingkungan rumah, dan fasilitas umum (BPS 2004).

Supraptini (2006) menjelaskan terdapat 14 indikator yang dapat dianalisis untuk menggambarkan rumah sehat. Indikator yang ada di dalam data Susenas, yaitu lokasi rumah, kepadatan hunian, jenis lantai, pencahayaan, ventilasi, air bersih, jenis jamban (WC), kepemilikan jamban, pembuangan akhir tinja, cara pembuangan air limbah, keadaan saluran/got, pembuangan sampah, polusi udara, dan bahan bakar untuk masak. Senada dengan yang diungkapkan oleh Supraptini, Fiadzo menggunakan 13 indikator untuk mengukur kualitas perumahan di Ghana, antara lain: jenis dinding, jenis atap, bahan bakar memasak, penerangan, pelayanan air, pembuangan kotoran, jabatan, dan jarak air minum terdekat, pasar yang menyediakan makanan, transportasi umum, Sekolah dasar, sekolah menengah, dan kesehatan (rumah sakit)

Kesejahteraan Subyektif

Pendekatan subyektif diperoleh dari persepsi masyarakat tentang aspek kesejahteraan sehingga hasilnya merupakan perkembangan dari aspek kesejahteraan. Pendekatan dengan indikator obyektif secara filosofi berhubungan erat dengan psikologi sosial masyarakat. Penduduk mungkin mempunyai pandangan tersendiri tentang apa arti kesejahteraan yang mungkin berbeda dengan

konsep obyektif. Konsep subyektif dapat memberikan pengertian yang mendalam tentang masalah kesejahteraan yang dihadapi rumah tangga. Model ini dianggap lebih sensitif untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga (Raharto dan Romdiati 2000).

Kesejahteraan dengan pendekatan subyektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bukan oleh orang lain. Pendekatan subyektif mendefinisikan kesejahteraan berdasarkan pemahaman penduduk mengenai standar hidup mereka dan bagaimana mereka mengartikannya (Santamarina *et. al* diacu dalam suandi 2005). Menurut Diener (2002) kesejahteraan subyektif didefinisikan sebagai evaluasi seseorang terhadap kehidupannya. Evaluasi dapat berupa pendapat kognitif, seperti kepuasan hidup dan respon emosi terhadap suatu peristiwa, seperti perasaan emosi yang positif.

Kesejahteraan subyektif merupakan istilah ilmiah dalam disiplin ilmu psikologi yang menunjuk pada evaluasi individu terhadap peristiwa yang dialami dan memberikan dampak positif atau negatif, kepuasan hidup, dan kebahagiaan (Guardiola & Munoz 2008). Penilaian individu mengenai tingkat kesejahteraan subyektif tidak hanya pada dirinya, akan tetapi membandingkan dengan orang lain, serta pengalaman masa lalu dan harapan masa depan (Frey & Stutzer 2002a diacu dalam Guardiola & Munoz 2008). Kesejahteraan subyektif di Negara berkembang merupakan konsep yang lebih luas, yang dihubungkan dengan debat mengenai kemiskinan, baik kemiskinan pendapatan maupun kemiskinan konsumsi, yang mencakup kebutuhan dasar (Gaugh & Mc Gregor 2007:3). Menurut Guardiola & Munoz (2008) tingkatan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang tergantung perasaan puas baik secara mental, sosial, dan berdasarkan kondisi lingkungan. Ruang lingkup kepuasan terhadap kebutuhan dapat mencakup kebutuhan pendidikan dasar, penanganan kesehatan, akses air bersih, dan kebutuhan tempat tinggal.

Determinan Kesejahteraan Keluarga

Menurut Syarif dan Hartoyo (1993) faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga terdiri dari faktor ekonomi dan bukan ekonomi. Faktor



ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memperoleh pendapatan. Keluarga yang tidak sejahtera memiliki pendapatan yang rendah. Rendahnya pendapatan menurut Sharp *et. al.* (1996) disebabkan oleh adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya, rendahnya SDM, serta perbedaan akses dan modal. Sementara faktor bukan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga antara lain budaya, teknologi, keamanan, kehidupan, dan kepastian hukum.

Rambe (2004) menyebutkan bahwa faktor yang menentukan kesejahteraan keluarga tergantung pada indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan keluarga. Selanjutnya dikatakan terdapat empat faktor yang konsisten berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga yaitu pendidikan, kondisi tempat tinggal, harga, dan pengeluaran. Menurut Iskandar (2007), aspek karakteristik keluarga, aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan eksternal, serta aspek manajemen sumberdaya keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Konsisten dengan pernyataan tersebut hasil studi menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga, umur suami, pendidikan suami, pendidikan istri, pendapatan, tabungan, dan kepemilikan aset, serta adanya perencanaan dalam keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Selain itu, hasil penelitian Lee dan Hanna (1990) dalam Iskandar (2007) menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh usia, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, tempat tinggal, ukuran rumah tangga, dan siklus hidup.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.